

**REKONSTRUKSI ATURAN PENGHAPUSAN PENCATATAN  
JAMINAN FIDUSIA DALAM SISTEM JAMINAN FIDUSIA  
DI INDONESIA**

**DISERTASI**

*Disusun sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan  
Gelar Doktor Ilmu Hukum*



**Pembimbing :**

- 1. Dr. Yuslim,SH.,MH**
- 2. Dr. Azmi Fendri,SH.,M.Kn**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2023**

# **REKONSTRUKSI ATURAN PENGHAPUSAN PENCATATAN JAMINAN FIDUSIA DALAM SISTEM JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA**

(Yelia Nathassa Winstar, NIM: 1630112008, Program (S3) Ilmu Hukum, Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas)

## **ABSTRAK**

Penghapusan pencatatan jaminan fidusia merupakan konsekwensi dari adanya pendaftaran jaminan fidusia. Kenyataannya, pelaksanaan penghapusan ini tidak berjalan sesuai perintah undang-undangnya. Urgensi penghapusan terletak pada pelaksanaan asas publisitas yang bertujuan untuk kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Sebagai sumber data adalah data sekunder dan menggunakan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini hendak mengkaji beberapa hal yang menjadi rumusan masalah. Pertama, mengkaji hakekat kedudukan penghapusan pencatatan jaminan fidusia dalam sistem jaminan fidusia, Kedua, pengaruh putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap keharusan penghapusan pencatatan jaminan fidusia. Ketiga, melakukan rekonstruksi aturan penghapusan pencatatan jaminan fidusia dalam rangka penegakan hukum. Berdasarkan temuan dari penelitian ini diketahui bahwa hakekat penghapusan pencatatan jaminan fidusia ini merupakan perwujudan asas publisitas pada hukum jaminan kebendaan. Sistem jaminan fidusia merupakan sub sistem dari sistem jaminan kebendaan dan sistem jaminan kebendaan merupakan sub sistem dari sistem hukum benda yang diatur dalam lingkup Buku II KUH Perdata. oleh karenanya, segala ketentuan hukum benda melekat pula pada norma jaminan fidusia yakni UU No.42 Tahun 1999. Aturan memaksa (*dwingend recht*) pada norma jaminan fidusia menyebabkan aturan penghapusan wajib dilaksanakan untuk menjaga ketertiban hukum. Hadirnya Putusan MK menyebabkan penerima fidusia dapat kehilangan hak eksekutorialnya namun tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan penghapusan. Demikian ini, menyebabkan ketidakadilan bagi penerima fidusia. Kelemahan substansi, struktur dan budaya hukum pada aturan penghapusan fidusia ini memerlukan adanya rekonstruksi. Rekonstruksi dilakukan dengan menambahkan kata wajib agar normanya menjadi *imperative* (memaksa), menambahkan sanksi sebagai daya paksa, memperluas pihak yang dapat melakukan penghapusan dan kewajiban melakukan pengecekan status objek jaminan sebelum melakukan pembebanan jaminan fidusia. Rekonstruksi Hukum merupakan satu cara menyempurnakan aturan hukum menuju hukum yang di cita citakan (*ius constituendum*)

Kata Kunci : Rekonstruksi, Penghapusan, Fidusia, Indonesia

# **RECONSTRUCTION OF THE RULES FOR THE ELIMINATION OF FIDUCIARY GUARANTEES IN THE FIDUCIARY GUARANTEE SYSTEM IN INDONESIA**

*(Yelia Nathassa Winstar, NIM: 1630112008, Program (S3) of Legal Sciences,  
Postgraduate of Legal Sciences, Faculty of Law of Andalas University)*

## **ABSTRACT**

*The delisting of fiduciary guarantees is a consequence of the registration of fiduciary guarantees. In reality, the implementation of this abolition did not proceed at the behest of its legislation. The urgency of abolition lies in the implementation of the principle of publicity aimed at legal certainty. The research method employed is normative legal research with descriptive findings. As a secondary data source, it uses primary, secondary, and tertiary laws. This research wants to examine several things that contribute to the formulation of the problem. First, it examines the nature of the position of the abolition of fiduciary guarantee records in the fiduciary guarantee system and, second, the effect of Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 on the necessity of delisting fiduciary guarantees. Third, reconstructing the rules for the removal of fiduciary guarantees in the context of law enforcement. Based on the findings of this study, it is known that the nature of the delisting of fiduciary guarantees is an embodiment of the principle of publicity in the law of treasury guarantees. The fiduciary guarantee system is a sub-system of the Treasury guarantee system, and the Treasury guarantee system is a sub-system of the legal system of objects regulated within the scope of Book II of the Civil Code. Therefore, all provisions of the law of objects are also attached to the fiduciary guarantee norm, namely Law No. 42 of 1999. The coercive rule (*dwingend recht*) on the fiduciary guarantee norm led to the mandatory abolition rule being implemented in order to maintain legal order. The presence of a Constitutional Court ruling causes the fiduciary beneficiary to lose his executory rights but still have the obligation to carry out the abolition. Thus, it causes injustice to the fiduciary beneficiary. This weakness of substance, structure, and legal culture in the fiduciary abolition rules requires reconstruction. Reconstruction is carried out by adding the word "mandatory" so that the norm becomes "imperative" (coercive), adding sanctions as a force of force, expanding the party who can carry out the abolition, and enforcing the obligation to check the status of the object of the guarantee before encumbering the fiduciary guarantee. Legal Reconstruction is a method of perfecting the rule of law toward the law (*ius constituendum*) to which it aspires.*

*Keywords : Reconstruction, Deletion, Fiduciary, Indonesia*

